

# IMPLEMENTASI KERJA SAMA MILITER INDONESIA DAN PRANCIS TERHADAP MODERNISASI ALUTSISTA INDONESIA PADA TAHUN 2015-2019

**Oleh : Aulia Rahmah Harahap**

(email: auliarahmah1005@gmail.com)

**Pembimbing: Indra Pahlawan, S.IP., M.Si.**

Bibliografi : 10 Buku, 8 Jurnal, 7 Dokumen Resmi, 17 Website

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru Pekanbaru

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the influence of the cooperation between Indonesia and France on the modernization of Indonesia's Main Weapon System Equipment (Alutsista) from 2015 to 2019. The modernization of Alutsista is crucial for Indonesia in maintaining national security and defense in the increasingly complex era of globalization. In order to fulfill the requirements for Alutsista, Indonesia has engaged in defense industry cooperation with France, which is considered more advanced in military technology.*

*This research utilizes K. J. Holsti's International Cooperation theory with Richard Bitzinger's Defense Transformation concept and employs a descriptive-analytical research method with a qualitative approach. The study adopts Neorealism perspective. Data were collected through a literature review from books, journals, reports, websites, and the analysis of official documents.*

*The data analysis reveals that the cooperation between Indonesia and France in the field of Alutsista modernization has had positive impacts on Indonesia's technological advancements, expertise, and Alutsista capabilities. This cooperation involves technology transfer, personnel training, improvement of defense industry capabilities, and acquisition of advanced weapon systems. Although the resulting impacts are not immediate, the cooperation between Indonesia and France can be considered as contributing to the advancement of Indonesia's defense resources before achieving the Minimum Essential Force (MEF) in 2024.*

*Keywords: Defense, Alutsista Modernization, MEF*

## PENDAHULUAN

Penelitian ini menganalisis tentang pengadaan dan peremajaan alutsista TNI demi mengamankan pembangunan nasional dan/atau kedaulatannya. Objek penelitian ini adalah Indonesia dan Prancis yang melakukan kerjasama pertahanan internasional pada periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi. Kerjasama pengadaan dan peremajaan alutsista erat kaitannya dengan pemenuhan *Minimum Essential Force* tahap kedua yaitu tahun 2015 hingga 2019. Penelitian ini akan berfokus pada alutsista apa saja yang diperoleh melalui kerjasama pertahanan yang dilakukan oleh kedua negara.

Pada era globalisasi saat ini, kemampuan militer setiap negara terus mengalami perubahan yang signifikan, fenomena tersebut mengancam posisi pertahanan Republik Indonesia dalam kancah internasional. Peningkatan kemampuan pertahanan negara-negara tersebut menjadikan transformasi dan modernisasi pada sektor pertahanan untuk mendukung pembangunan nasional harus diprioritaskan dalam rangka menciptakan bangsa yang kuat dan berdaya saing. Tindakan tersebut bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan negara serta membangun kekuatan militer yang mampu menjalankan fungsinya dalam menghadapi ancaman yang semakin kompleks pada lingkup regional maupun internasional.<sup>1</sup> Ancaman-ancaman yang dikhawatirkan dapat berbentuk militer,

---

<sup>1</sup>Kementerian Pertahanan RI, "*Buku Putih Pertahanan Indonesia*" (Jakarta: Direktorat Jendral Strategi Pertahanan, 2015), 8.

seperti agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, dan lain sebagainya, atau berbentuk nirmiliter seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia dan imigran gelap.

Penyempurnaan transformasi militer dan modernisasi alutsista pada sektor pertahanan Indonesia saat ini masih belum bisa dilakukan secara mandiri. Indonesia membutuhkan kerjasama pertahanan dengan negara lain yang lebih maju dalam bidang teknologi, salah satu negara yang menjalin kerjasama dalam bidang militer dengan Indonesia adalah Prancis. Hubungan bilateral Indonesia dan Prancis dimulai pada bulan September tahun 1950<sup>2</sup>. Kerjasama antar kedua negara tersebut terjalin dengan baik dan tanpa hambatan serta terus mengalami peningkatan, dapat dilihat dari jalinan kerjasama yang terjadi di berbagai sektor hingga saat ini.

Faktor utama yang mendorong keharmonisan lingkungan kerjasama Indonesia dengan Prancis adalah kesamaan prinsip kebijakan dan politik luar negeri yang dianut oleh kedua negara tersebut, yaitu bebas aktif atau *Politique Indépendance France*<sup>3</sup>. Memiliki prinsip kebijakan dan politik luar negeri yang sama membantu kedua negara memenuhi kepentingan nasional dan mencapai tujuan politik dengan lebih mudah karena prinsip kedua negara sudah sejalan.

---

<sup>2</sup>Kedutaan Besar Republik Indonesia Paris Prancis, "*Hubungan Bilateral Prancis-Indonesia*", Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, diakses pada 15 Desember 2022.

<sup>3</sup> Delegasi Komisi I DPR RI, "Laporan Studi Banding RUU Tentang KMIP ke Prancis," (Jakarta: DPR RI, 2007), 4.

Kerjasama ini, sama halnya seperti kerjasama antarnegara lainnya, diperlukan karena masing-masing negara memiliki kepentingan nasional. Menurut Prancis, Indonesia adalah rekan strategis yang penting dalam menjaga keamanan di kawasan Indo-Pasifik sebagai sebuah wilayah yang penting bagi perekonomian global. Prancis mengakui Indonesia sebagai salah satu pendiri ASEAN dan memiliki peran yang signifikan di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik. Indonesia pada sisi lain, melihat kesempatan untuk meningkatkan kerjasama khususnya di bidang pertahanan dengan Prancis, sehingga dapat mengoptimalkan potensi dan memperkuat kekuatan pertahanan negara di berbagai sektor.

Prancis dianggap sebagai negara yang berpotensi membantu peningkatan industri pertahanan Indonesia karena Prancis termasuk ke dalam urutan sepuluh negara dengan kekuatan militer terkuat.<sup>4</sup> Prancis berada pada urutan enam di tahun 2015 dengan *Power Index* 0,30 kemudian naik satu tingkat ke urutan lima pada tahun 2016 dan tetap konsisten pada urutan lima hingga 2019 dengan *Power Index* mencapai 0,15. Ketentuan *Power Index* yang sempurna adalah 0,0000, sehingga dapat disimpulkan bahwa kekuatan militer Prancis sudah hampir mencapai sempurna.

Prancis juga berada pada urutan ke-delapan negara dengan anggaran militer terbesar di dunia pada tahun 2019 dengan alokasi dana sebesar 50,1 miliar

---

<sup>4</sup> "Military Strength Ranking," Global Firepower, diakses pada 15 Desember, 2022, <https://www.globalfirepower.com/global-ranks-previous.php>

dollar AS.<sup>5</sup> Dana yang digelontorkan Prancis untuk pengeluaran militernya terus meningkat dari tahun 2015, dimulai dari angka 45,6 miliar dollar AS hingga menyentuh angka 53,6 miliar dollar pada tahun 2022. Faktor-faktor tersebut memperkuat alasan Indonesia untuk terus melanjutkan kerjasama militer dengan Prancis dalam memenuhi target pengadaan alutsista.

Hubungan bilateral Indonesia-Prancis yang dimulai sejak tahun 1950 tersebut mencakup beberapa bidang dalam proses peremajaan atau modernisasi alutsista, yaitu bidang pendidikan dan pelatihan militer melalui program yang setara dengan tingkat Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) dan Sekolah Spesialisasi Angkatan Laut yang diselenggarakan di Prancis, kerjasama pengadaan logistik, serta perawatan, perbaikan dan *overhaul* pesawat buatan Prancis. Pada kerjasama dalam sektor pengadaan logistik terdapat kesepakatan berupa *Memorandum of Understanding (MoU)* yang pertama kali ditandatangani di Paris pada 11 Juli 1996.<sup>6</sup> MoU tersebut kemudian diperbarui secara berkelanjutan melalui proses pengkajian yang panjang setiap lima tahun sekali.

MoU yang ditandatangani pada tahun 1996 tersebut kemudian menghasilkan kerjasama antar Industri Pertahanan Nasional Indonesia dengan

---

<sup>5</sup> "Military Expenditure Database," Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), diakses pada 15 Desember, 2022, <https://milex.sipri.org/sipri>

<sup>6</sup> Kedutaan Besar Republik Indonesia Paris Prancis, "Hubungan Bilateral Prancis-Indonesia", Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, diakses pada 15 Desember 2022

Prancis salah satunya pada produksi Anoa 6x6 APC (*Armoured Personnel Carrier*) yang diproduksi untuk melengkapi alutsista TNI AD. Anoa 6x6 APC adalah kendaraan militer generasi pertama kendaraan tempur yang diproduksi oleh PT Pindad, Indonesia.<sup>7</sup> Kendaraan tempur ini dilengkapi mesin milik Renault Prancis yakni mesin MIDR 062045 diesel turbo-charged 6 silinder *inline* dan paket pendingin behr 320Hp, 2500 rpm. Anoa 6x6 APC juga dikenal dengan nama panser atau pengangkut personel dan merupakan kendaraan tempur infantry lapis baja atau *Infantry Fighting Vehicle* (IFV).

Berangkat dari penandatanganan MoU pada tahun 1996 tersebut, kerjasama pertahanan Indonesia dan Prancis terus mengalami perkembangan, seperti pada tahun 2012, Indonesia dan Prancis menyetujui pembentukan *Indonesian-France Defence Dialogue* (IFDD) sebagai forum dialog yang mengkaji setiap kerjasama yang telah dijalankan setiap tahunnya sejak tahun 2013 untuk kemudian menjadi wadah bagi kedua negara menyampaikan ide-ide dalam meningkatkan kerjasama di masa yang akan datang.<sup>8</sup> Menindak lanjuti hasil-hasil pertemuan *Indonesian-France Defence Dialogue* (IFDD), pada pertemuan IFDD ke-lima yang diselenggarakan di Jakarta pada 29 Maret 2017, menteri pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu dan menteri pertahanan Prancis Jean-Yves Le Drian

menandatangani *Letter of Intent* (LoI) tentang Peningkatan Kerjasama Pertahanan Kedua Negara Indonesia dan Prancis.<sup>9</sup> Penandatanganan LoI tersebut disepakati dalam rangka memperdalam dan meningkatkan kerjasama pertahanan kedua negara dengan memperluas kerangka dan ruang lingkup IFDD dengan semangat saling menguntungkan dan kemitraan. Selain itu, dalam rangka kerjasama industri pertahanan, kedua negara menyepakati dilaksanakannya *Transfer of Technology* (ToT) maupun produksi bersama dalam setiap pengadaan alutsista.

Modernisasi atau pengadaan dan peremajaan alutsista di Indonesia dibantu oleh perumusan sebuah rancangan strategis yaitu pemenuhan Kekuatan Pokok Minimum yang disebut juga dengan *Minimum Essential Force*. Kebijakan *Minimum Essential Force*, yang sering disebut sebagai MEF, awalnya diperkenalkan pada tahun 2007 pada masa pemerintahan Prof. Dr. Juwono Sudarsono selama ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia pada periode 2004-2009.<sup>10</sup> Kebijakan ini mencerminkan mandat pembangunan nasional di bidang pertahanan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010. Rincian lebih lanjut tentang

<sup>7</sup> "Anoa 6X6 APC," PT Pindad, diakses tanggal 15 Desember 2022, tersedia di:

<https://pindad.com/anoa-6-x-6-apc>

<sup>8</sup> "Menhan RI dan Menhan Prancis Terus Pererat Kerjasama Pertahanan," Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, diakses pada 20 Desember 2022

<sup>9</sup> "Menhan RI Terima Kunjungan Kehormatan Menhan Perancis", Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, diakses pada 20 Desember 2022

<sup>10</sup> Ervita L. Zahara & Arjun Rizky M.N. (2020). Anggaran Pertahanan Indonesia Pemenuhan Minimum Essential Force. Retrieved from <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/analisis-ringkas-cepat/public-file/analisis-ringkas-cepat-public-28.pdf>, p. 4.

kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 yang berjudul "Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force Komponen Utama".

Kekuatan Pokok Minimum atau MEF dapat dipahami secara ringkas sebagai proses bertahap yang bertujuan untuk mencapai standar minimum dalam sistem pertahanan negara. Fokus utamanya adalah memastikan kelengkapan alat pertahanan, termasuk upaya dalam memodernisasi Alat Utama Sistem Senjata (alutsista) pada ketiga matra TNI, yaitu TNI Angkatan Darat (AD), TNI Angkatan Udara (AU), dan TNI Angkatan Laut (AL). Program MEF dibagi ke dalam tiga tahap yang masing-masing tahapannya berdurasi lima tahun, seperti tahap pertama 2010-2014, tahap kedua 2015-2019, tahap ketiga 2020-2024.<sup>11</sup> Masing-masing tahap memiliki target persentase pencapaian tersendiri seperti MEF I sebesar 57,24% dan MEF II sebesar 75,54%. Target pemenuhan 100% diharapkan rampung pada tahun 2024, tepat pada akhir tahap ketiga MEF.

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah diatas, penulis mengambil pertanyaan penelitian yaitu *Bagaimana Implementasi Kerjasama Militer Indonesia dan Prancis terhadap Modernisasi Alutsista Indonesia Tahun pada tahun 2015-2019?*

## KERANGKA TEORI

### Teori Kerjasama Internasional

Landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kerjasama Internasional yang

dikemukakan oleh K. J. Holsti. Penggunaan teori ini disesuaikan dengan pokok pembahasan penelitian yaitu mengenai pengembangan postur pertahanan serta teknologi pada alutsista melalui kerjasama militer.

K. J. Holsti memaparkan definisi proses kerjasama internasional ke dalam beberapa poin, yaitu:<sup>12</sup>

1. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
2. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lain akan membantu negaranya untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilai nasional.
3. Persetujuan akan penyelesaian masalah-masalah antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan antar negara.
4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan kerjasama.
5. Transaksi antar negara untuk memenuhi kesepakatan bersama.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> K.J. Holsti. 1988. *Politik Internasional, Kerangka Unit Analisis, jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari.* Jakarta: Erlangga Hal 209

Berdasarkan kerangka pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa kerjasama internasional menurut K. J. Holsti merupakan sebuah bentuk pandangan tentang bagaimana dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan negara-negara yang saling berkaitan kemudian bertemu dan menghasilkan kesepakatan kerjasama yang ditingkatkan dan dipenuhi oleh setiap pihak yang bersangkutan.

Holsti juga memaparkan bahwa ada beberapa faktor pendorong negara melakukan kerjasama dengan negara lain dalam lingkup global yang diantaranya:

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan minimalnya biaya dan keterbatasan produksi yang di keluarkan untuk berbagai produk kebutuhan masyarakat;
2. Efisiensi penggunaan biaya dan ancaman keamanan bersama;
3. Minimalisir kerugian setiap tindakan satu negara yang kemudian berdampak kepada negara lainnya.

Kerjasama internasional merupakan bentuk perkembangan yang paling pesat dalam dinamika hubungan luar negeri. Output dari kerjasama internasional nanti akan direalisasikan oleh negara negara yang terlibat dalam kerjasama tersebut untuk dituangkan dalam perundang-undangan nasional yang dimaksudkan agar implementasi dari poin kerjasama dapat dilakukan secara lebih menyeluruh.

### **Konsep Transformasi Pertahanan**

Selain teori kerjasama internasional, penelitian ini juga akan menggunakan

suatu konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji. Konsep yang digunakan adalah konsep Transformasi Pertahanan yang dikemukakan oleh Richard Bitzinger. Richard Bitzinger mengutarakan bahwa teknologi menjadi faktor determinan paling utama atau kritical dalam transformasi pertahanan. Menurutnya kehadiran teknologi persenjataan mutakhir kerap menjadi dorongan utama bagi perubahan pada aspek militer lainnya.<sup>13</sup> Transformasi alutsista akan menjadi garis awal pembaruan aspek-aspek kemiliteran lainnya, contohnya pengembangan SDM dengan diadakannya pelatihan kemiliteran untuk anggota yang akan mengoperasikan persenjataan.

Bitzinger juga menyatakan bahwa transformasi pertahanan mengacu kepada modernisasi suatu angkatan bersenjata daripada perubahan paradigma dalam karakter dan bagaimana perang dijalankan. Lebih lanjut ia juga mengatakan bahwa penggunaan teknologi baru dalam angkatan bersenjata akan membutuhkan perubahan mendasar dalam doktrin militer, operasi, dan organisasi.<sup>14</sup>

## **PEMBAHASAN**

Hubungan kerjasama Indonesia dan Prancis terjalin dengan sangat baik

---

<sup>13</sup> Richard A. Bitzinger, "Military-technological innovation in small states: The cases of Israel and Singapore," *Journal of Strategic Studies* (2021): 1–28

<sup>14</sup> Richard A. Bitzinger, "Come The Revolution, Transforming The Asia-Pacific's Militaries", *Naval War College Review* (Autumn 2005, Vol. 58 no. 4), hal. 38

hingga saat ini. Kerjasama bilateral Indonesia dan Prancis pada dasarnya telah terjalin sejak September 1950, kemudian seterusnya hubungan kedua negara tersebut semakin menunjukkan peningkatan tanpa disertai masalah-masalah berarti yang mengganggu keakraban antara kedua negara. Ruang lingkup kerjasama yang terjalin antara kedua negara dapat dikatakan cukup luas yaitu pada bidang perdagangan dan investasi, pendidikan, industri pertahanan, kebudayaan dan pariwisata, serta pengurangan dampak perubahan iklim.<sup>15</sup> Bidang pada kerjasama tersebut menjadi lima pilar penting dalam hubungan bilateral Indonesia dan Prancis.

Kerjasama bilateral Indonesia-Prancis dalam bidang industri pertahanan dimulai sejak ditandatanganinya Memorandum Kesepahaman (MoU) tentang Kerjasama Dalam Bidang Peralatan, Logistik dan Industri Pertahanan antara Kementerian Pertahanan Indonesia dan *French Ministry of Defense* pada 11 Juli 1996.<sup>16</sup> Penandatanganan MoU mengenai kerjasama dalam bidang peralatan, logistik, dan institusi pertahanan tersebut didasari oleh keinginan kedua negara untuk mendukung kemajuan industri pertahanan masing-masing serta meningkatkan kualitas pertahanan kedua negara. Dalam MoU tersebut kemudian juga disepakati terbentuknya Komite Bersama dalam bidang Peralatan, Logistik dan Industri Pertahanan yang kemudian akan memprakarsai, mengkoordinasikan dan

memonitor pelaksanaan kegiatan yang berada dalam kerangka kerja MoU.

Pada tahun 2012 kedua negara juga menandatangani Pengaturan Teknis tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan, disepakati pada kerjasama tersebut meliputi: pengembangan industri pertahanan, dialog strategis pertahanan, pertukaran informasi intelijen, dan operasi penjaga perdamaian.<sup>17</sup> Bersamaan dengan peraturan tersebut, kedua negara juga menyetujui pembentukan forum dialog melalui *Indonesian-French Defense Dialogue (IFDD)* yang merupakan ajang untuk menjalin kerjasama pertahanan dan militer antara kedua negara. Dalam IFDD, terdapat tiga kelompok kerja, yaitu *Strategic Views*, *Military Cooperation*, dan *Defence Industry*. IFDD dilaksanakan setiap tahunnya sejak tahun 2013 dengan pelaksanaan terakhir hingga saat ini adalah pada tahun 2022 di Jakarta.<sup>18</sup> *Indonesian-French Defense Dialogue* adalah forum dialog antara pihak militer Indonesia dan Prancis yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara kedua negara dalam bidang pertahanan.

Pertemuan IFDD diadakan secara rutin dan dihadiri oleh pejabat pertahanan dari kedua negara, di mana mereka membahas berbagai isu strategis dan operasional di bidang pertahanan. Beberapa topik yang dibahas dalam pertemuan *Indonesian-French Defense*

---

<sup>15</sup>Kedutaan Besar Republik Indonesia Paris Prancis, "*Hubungan Bilateral Prancis-Indonesia*", Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, diakses pada 15 Desember 2022.

<sup>16</sup>*Ibid.*

---

<sup>17</sup>Kementerian Pertahanan RI, "*Buku Putih Pertahanan Indonesia*" (Jakarta: Direktorat Jendral Strategi Pertahanan, 2015)

<sup>18</sup>"*Indonesia-France Defence Dialogue (IFDD) ke-9 Tahun 2022*" Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, diakses pada 15 Desember 2022.

*Dialogue* antara lain pengembangan teknologi militer, pertukaran pengalaman dalam operasi militer, pelatihan dan pendidikan, serta isu-isu regional dan internasional yang terkait dengan keamanan dan pertahanan. Kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Prancis terus ditingkatkan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk melalui peningkatan pertukaran delegasi militer, kerjasama dalam bidang pelatihan dan pendidikan militer, serta kerjasama teknologi pertahanan.

Kemudian pada tahun 2017 Kementerian Pertahanan (Kemhan) Indonesia dan Kemhan Prancis menandatangani *Letter of Intent* (LoI) mengenai Peningkatan Kerjasama Pertahanan.<sup>19</sup> Selanjutnya pada tahun 2020, hubungan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Prancis diperkuat kembali dengan adanya pertemuan diplomatik antara kedua menteri pertahanan, Prabowo Subianto dan Florence Parly. Pertemuan kedua menteri pertahanan dilaksanakan pada 13 Januari 2020 di kota Paris. Beberapa hal yang menjadi pembahasan dari pertemuan tersebut adalah upaya untuk mempererat kerjasama pertahanan kedua negara terutama upaya untuk memperkuat sistem alutsista TNI dan memajukan industri pertahanan nasional.<sup>20</sup>

Kerjasama pertahanan Indonesia dan Prancis memiliki cakupan yang besar,

---

<sup>19</sup> “Menhan RI Terima Kunjungan Kehormatan Menhan Perancis”, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, diakses pada 20 Desember 2022

<sup>20</sup> “Kunker Menhan RI ke Prancis, Tandai 70 Tahun Hubungan Diplomati RI – Prancis”, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, diakses pada 20 Mei 2023

tidak hanya berhenti pada kunjungan diplomatik saja. Selain yang telah disebutkan di atas, kerjasama antar Industri Pertahanan juga dirasa perlu untuk ditingkatkan, dalam hal ini mengenai *Transfer of Technology* (ToT). Kelanjutan pembahasan mengenai *Mutual Protection on Clasified Information* (MPCI) juga akan dilakukan untuk meningkatkan keamanan siber dan informasi. Lebih lanjut, LoI 2017 tersebut menindaklanjuti pembahasan dalam mempertimbangkan persetujuan kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan Prancis yang akan dirangkul dalam *Defence Cooperation Agreement* (DCA). Pada 28 Juni 2021, dalam kunjungan kerja menteri pertahanan ke Prancis, menteri pertahanan Prabowo Subianto akhirnya menandatangani surat perjanjian pertahanan (DCA) dengan disaksikan Dubes RI untuk Prancis Arrmanatha Nasir serta Atase Pertahanan RI dan Asisten Khusus Menhan, di kantor Kementerian Pertahanan Prancis. Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan kedua Menhan pada bulan Januari 2020 lalu. Setelah melalui perundingan cukup panjang, di tengah pandemi Covid-19, kedua Menhan menyepakati teks perjanjian kerjasama pertahanan, yang tidak saja menjadi payung kerjasama pertahanan tetapi juga memperkokoh kemitraan strategis kedua negara yang ditandatangani pada tahun 2011.<sup>21</sup>

### **Kerjasama Bilateral Indonesia Dan Prancis Dalam Bidang Industri Pertahanan**

---

<sup>21</sup> “Menhan Prabowo Tandatangani Perjanjian Kerjasama Pertahanan RI – Prancis”, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, diakses pada 20 Mei 2023

Sebelum penelitian ini menjelaskan lebih jauh mengenai kerjasama apa saja yang terjadi antara Indonesia dan Prancis, perlu diingat kembali bahwa setiap kerjasama yang terjadi antar industri pertahanan di Indonesia, semua dilakukan atas persetujuan dan pengawasan Kementerian Pertahanan RI, hal ini berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002. Pada Pasal 16 UU No. 3 Tahun 2002 diuraikan tugas dari Menteri Pertahanan sebagai pembantu Presiden dalam Pertahanan Negara. Berikut ini adalah kerjasama industri pertahanan yang dilakukan Prancis dan Indonesia:

### 2.3.1 Eurocopter (Airbus Helicopter)

Grup Eurocopter didirikan pada tahun 1992 melalui penggabungan divisi rotorcraft dari Aerospatiale (Prancis) dan Deutsche Aerospace (Jerman). Pada bulan Januari 2014, perusahaan ini mengganti namanya menjadi Airbus Helicopters.<sup>22</sup> Airbus Helicopters adalah produsen helikopter terkemuka di dunia yang menawarkan berbagai jenis helikopter sipil dan militer yang paling lengkap di dunia. Dengan lebih dari 22.000 karyawan di seluruh dunia, armada perusahaan yang beroperasi mencakup sekitar 12.000 helikopter yang digunakan oleh lebih dari 3.000 pelanggan di 154 negara termasuk Indonesia. Sejak tahun 2012, PT. Dirgantara Indonesia telah memiliki Perjanjian Komersial dan Industri (Commercial and Industrial Agreement/CIA) dengan Eurocopter/Airbus Helicopter.<sup>23</sup> Produk

---

<sup>22</sup> Airbus, "A Journey to Airbus' Roots", Airbus, diakses pada 20 Mei 2023, [https://www.airbushelicopters.co.za/website/en/ref/History\\_186.html](https://www.airbushelicopters.co.za/website/en/ref/History_186.html)

<sup>23</sup> Dirgantara Indonesia, "Aircraft AS550", PT.DI, diakses pada 20 Mei 2023,

dari Airbus Helicopter yang kemudian dikerjasamakan dengan industri pertahanan Indonesia antara lain Helikopter AS550 C3e Fennec (2012 – 2017), Helikopter H225/H225M (2016 – 2017), Helikopter AS565 M Panther (2017 – 2020), dan Helikopter AS532 Cougar (2001 – 2021).

### 2.3.2 MBDA Missile Systems

MBDA adalah perusahaan multinasional Eropa yang berfokus pada pengembangan dan produksi misil. Perusahaan ini dibentuk pada bulan Desember 2001 melalui penggabungan perusahaan-perusahaan terkemuka dalam sistem misil di Prancis, Italia, dan Britania Raya.<sup>24</sup> Setiap perusahaan berkontribusi dengan pengalaman mereka selama lima puluh tahun dalam mencapai kesuksesan teknologi dan operasional.

MBDA dan PT Pindad Indonesia kemudian mengesepakati *Memorandum of Understanding* (MoU) di mana kedua perusahaan tersebut akan menjalin kemitraan industri dalam pemasaran sistem misil yang akan dipasang pada kendaraan militer.<sup>25</sup> PT. Pindad, yang dimiliki oleh negara, merupakan produsen utama peralatan militer, alat industri, dan mesin di Indonesia.

---

[https://www.indonesian-aerospace.com/aircraftid/detail/34\\_as550](https://www.indonesian-aerospace.com/aircraftid/detail/34_as550)

<sup>24</sup> MBDA, "History: FIFTY YEARS OF EUROPEAN TECHNOLOGICAL AND OPERATIONAL EXCELLENCE", MBDA, diakses pada 20 Mei 2023, <https://www.mbda-systems.com/about-us/history/>

<sup>25</sup> MBDA, "Press Releases: MBDA SIGNS INDUSTRIAL ACCORD WITH PT. PINDAD OF INDONESIA", MBDA, diakses pada 20 Mei 2023, <https://www.mbda-systems.com/press-releases/mbda-signs-industrial-accord-with-pt-pindad-of-indonesia/>

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh kedua perusahaan dalam acara resmi yang dihadiri oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia, Dr. H. Sugiharto, S.E., M.B.A., pada tanggal 23 November 2006 selama pameran IndoDefence 2006 di Jakarta.

Bentuk kerjasama MBDA Missile System dengan Indonesia setelah penandatanganan MoU tersebut di atas adalah melalui kolaborasinya dengan PT. Pindad dalam menciptakan varian Komodo 4X4 Missile Launcher (2014 – 2016), kemudian MBDA juga bekerjasama dengan PT. Dirgantara Indonesia dalam membangun *Air Defence and Anti-Ship Weapons Systems based on MBDA Missiles* (2016 – 2022), yang terakhir adalah pengadaan rudal MICA yang digunakan sebagai *Surface-to-Air Missile* (2016 – 2020).

### 2.3.3 Nexter Group

Nexter adalah salah satu perusahaan terkemuka di Prancis dalam industri pertahanan darat dan menjadi salah satu pemain kunci di Eropa dalam sektor amunisi. Perusahaan ini juga merupakan bagian dari KNDS Group. Sebelum dikenal sebagai Nexter Group, industri pertahanan milik pemerintah Prancis ini dikenal sebagai Groupement des Industries de l'Armée de Terre (GIAT) yang didirikan pada 1973 dan kemudian berganti nama menjadi Nexter Group pada 22 September 2006.

Kerjasama antara Nexter Group dan industri pertahanan Indonesia dimulai setelah penandatanganan kontrak pengadaan 37 unit Meriam Caesar 155 MM/GS pada tahun 2013 oleh Menhan Ryamizard Ryacudu, Meriam tersebut dikirim secara berkala hingga tahun 2015.

Tidak hanya membeli produk dari Nexter, pemerintah Indonesia memanfaatkan kesempatan melalui hubungan kedekatan ini untuk kemudian melakukan *Transfer of Technology* pada tahun 2017 di PT. Pindad Bandung untuk 18 unit Meriam Caesar 155 MM/GS. Melalui kesepakatan *Transfer of Technology* dalam pembangunan meriam, PT. Pindad dan PT. LEN mendapat offset berupa cara produksi meriam itu sendiri, dapat mengintegrasikan, menggunakan dan memelihara *Fire Control System* (FCS) Finart dan cara bagaimana mendesain, memproduksi, mengintegrasikan serta melakukan pengetesan terhadap kendaraan pendukung.

### 2.3.4 Renault Truck Defense

Renault Trucks adalah sebuah produsen truk dan kendaraan militer yang berkantor pusat di Saint-Priest dekat Lyon, Prancis. Perusahaan ini mulai beroperasi pada tahun 1978 dengan nama *Renault Véhicules Industriels*. Kerjasama dimulai pada 2006 di mana PT. Pindad menggunakan paket pendingin VAB 320Hp dalam memproduksi Panser Anoa 6X6 atau kendaraan angkut personel lapis baja. Pembelian terhadap mesin tersebut masih terus berlangsung, pada tahun 2013-2015 Indonesia menerima mesin MIDR untuk produksi Anoa 6X6 sejumlah 134 unit. Pada tahun 2016 PT. Pindad kembali melakukan pembelian baru, yaitu mesin diesel MIDR untuk diaplikasikan dalam Ranpur 6X6 Pindad Badak sebanyak 50 unit, berdasarkan kebutuhan TNI AD.

Pada tahun 2011 hingga 2015, Pemerintah Indonesia melakukan pemesanan Renault *Light Scout Sherpa* sebanyak 100 unit yang kemudian 12 unit

diantaranya dimodifikasi dan dilisensi sebagai kendaraan pengintai “Elang” 4X4 oleh PT. Pindad.

### 2.3.5 Thales

Thales adalah perusahaan multinasional milik Prancis yang merancang dan membangun sistem elektrik yang mencakup bidang kedirgantaraan, pertahanan, transportasi dan keamanan. Sebelumnya, perusahaan yang bergerak dalam bidang pertahanan Prancis ini bernama Thomson-CSF yang dibangun sejak 1879. Pada bulan Desember tahun 2000, perusahaan tersebut merubah nama menjadi Thales karena dirasa nama Thomson-CSF sudah tidak relevan dengan produk-produk yang semakin berkembang.

Thales juga merupakan mitra bagi industri pertahanan Indonesia terutama dengan PT. LEN dan PT. Pindad. Pada 2014 telah ditandatangani kontrak pembelian *Air Search Radar Ground Master-200* sebanyak 5 unit. Pengadaan terhadap radar ini dilakukan mulai dari tahun 2016 hingga 2017. Radar *Ground Master-200* ini akan menjadi bagian dari *Contro lmaster-200 Command System* yang terpasang pada *Forceshield SAM System* dari UK. Thales Prancis kemudian melakukan *Transfer of Knowledge* dengan PT. LEN dalam pemeliharaan radar tersebut pada April 2019 guna mengembangkan keahlian lokal dalam manajemen dan pemeliharaan radar.

### 2.3.6 Dassault Aviation

Dassault Aviation merupakan sebuah perusahaan dirgantara Prancis yang membuat pesawat militer, jet regional, jet bisnis, dan pesawat jet. Perusahaan ini didirikan oleh Marcel

Bloch dengan nama *Société des Avions Marcel Bloch* atau "MB". Setelah Perang Dunia II, Marcel Bloch mengganti namanya menjadi Marcel Dassault dan nama perusahaannya berubah menjadi Avions Marcel Dassault pada 20 Desember 1947. Pada tahun 1990, nama perusahaan diganti menjadi Dassault Aviation.

Kerjasama antara PTDI dan Dassault Aviation akhirnya menghasilkan *Memorandum of Understanding (MoU)* tentang kerjasama dalam program *offset* dan ToT pesawat tempur Rafale. Dokumen MoU ditandatangani oleh Direktur Utama PTDI dan Chairman & CEO Dassault Aviation, proses penandatanganan disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan RI dan Menteri Angkatan Bersenjata Republik Prancis. Melalui pertemuan tersebut, Indonesia menandatangani kontrak pengadaan 42 pesawat tempur Rafale yang ditargetkan akan mulai dikirim pada tahun 2025-2026 setelah kontrak pengadaan dinyatakan efektif, enam diantaranya telah efektif setelah Indonesia membayar uang muka ke Prancis, Indonesia kini tinggal menanti selesainya produksi pesawat tempur tersebut untuk siap dipakai.

### Alutsista TNI semenjak berlakunya MEF

*Minimum Essential Force* atau MEF merupakan salah satu program yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan modernisasi kekuatan militer Indonesia. MEF adalah amanat pembangunan nasional bidang pertahanan keamanan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 sesuai Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun

2010.<sup>26</sup> Kepentingan utama kebijakan penyempurnaan MEF adalah untuk mengoreksi faktor perencanaan, mekanisme penyelenggaraan dan anggaran pertahanan agar tidak menyimpang dari sistem manajemen pengambilan keputusan pertahanan negara dan agar sesuai dengan tatanan kewenangan. Penyempurnaan MEF memiliki unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam prosesnya, unsur tersebut terdiri dari sumber daya manusia, materiil/alat utama sistem senjata (alutsista) TNI, sarana pangkalan dan daerah latihan, industri pertahanan, organisasi, dan anggaran. Tujuan dari diadakannya kebijakan MEF adalah untuk membentuk pedoman bagi penyusunan kebijakan-kebijakan terkait pembangunan postur pertahanan negara. Penyelarasan MEF akan memberikan wujud nyata pengembangan kekuatan Trimatra Terpadu yang merupakan bagian dari rencana dasar MEF, sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap melalui empat strategi pengembangan MEF, yaitu rematerialisasi, revitalisasi, relokasi, dan pengadaan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010, MEF dibagi dalam tiga tahap; tahap pertama adalah tahun 2010-2014 di mana aspeknya adalah pada pemenuhan alutsista, kemudian tahap kedua tahun 2015-2019 yang aspeknya meliputi pemenuhan alutsista, pengembangan organisasi serta pemeliharaan dan perawatan dan tahap terakhir tahun 2020-2024 di mana aspek pendukung pemenuhannya adalah pada kemajuan dan kemandirian industri pertahanan, profesionalisme dan

kesejahteraan. Diharapkan pada pemenuhan MEF tahap tiga Indonesia telah memasuki era kemandirian alutsista nasional dalam memproduksi alat pertahanan.

Dalam proses perencanaan pembangunan pertahanan, Indonesia menerapkan pengembangan kekuatan militer, termasuk pengadaan alutsista berdasarkan identifikasi ancaman. Setelah kebijakan MEF diimplementasikan pada tahun 2010, telah diketahui bahwa terjadi peningkatan dalam modernisasi alutsista, tidak hanya dari segi kuantitas namun juga dalam segi kualitasnya.

Industri pertahanan merupakan elemen pendukung utama dalam memenuhi MEF Indonesia, yang merupakan bentuk pelaksanaan langsung dari konsep *Revolution in Military Affairs* (RMA). Untuk itu, melalui MEF industri pertahanan Indonesia didorong untuk lebih berkembang, maju, berdaya saing dan mandiri. Melalui MEF pemerintah mengharapkan terjadinya Transformasi Pertahanan di mana terwujudnya Negara Autarki atau negara dengan kemandirian pertahanan. Pembangunan MEF tidak semata-mata diarahkan pada pengadaan alutsista hingga mencapai postur ideal pertahanan, melainkan untuk memenuhi tujuan lainnya yang meliputi peningkatan kemampuan industri pertahanan, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, kebijakan MEF mengacu pada Undang-Undang Industri Pertahanan pasal lima ayat dua di mana setiap pengadaan alutsista untuk kekuatan militer Indonesia, harus melibatkan Industri

---

<sup>26</sup> Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 19 Tahun 2012, Lampiran, hal. 4

Pertahanan dalam negeri.<sup>27</sup> Sadar akan kurangnya sumber daya dan teknologi, pemerintah Indonesia tidak semata-mata menolak kontribusi dari luar negeri dalam pengadaan alutsista melaikan mengharuskan setidaknya terdapat kandungan lokal maupun *offset* dari pengadaan luar negeri.

### **Pengaruh Kerjasama Indonesia-Prancis Terhadap Modernisasi Alutsista Tahun 2015-2019**

Dengan membeli sejumlah helikopter, ranpur, dan KRI dari Pemerintah Prancis untuk mempertahankan kedaulatan NKRI, Indonesia dihadapkan pada tanggung jawab besar untuk secara aktif berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia. Setelah menjalin kerjasama dengan Prancis, terutama dalam hal pertahanan militer TNI AD, kemampuan alat utama sistem persenjataan Indonesia mengalami peningkatan. Tiga angkatan TNI akan lebih berfokus pada transformasi guna menghadapi perkembangan lingkungan strategis yang mungkin dihadapi Indonesia dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme militer Indonesia sehingga dapat menjawab tantangan dan perubahan zaman dengan baik.

Melalui kerjasama dengan Prancis pula, Indonesia mampu mengambil manfaat yang akan turut mempengaruhi pembangunan postur pertahanan. Sejak kemitraan strategis yang disepakati pada tahun 2011, Prancis menyatakan

dukungan penuhnya terhadap cita-cita Indonesia menjadi negara yang mandiri. Komitmennya tersebut diwujudkan dengan terbentuknya IFDD yang masih terus berjalan hingga saat ini. Melalui IFDD Indonesia dan Prancis kemudian dapat berdiskusi terkait kerjasama pertahanan sesuai dengan kebutuhan kedua negara. Melalui IFDD, Prancis mendorong industri pertahanannya untuk membantu Indonesia dalam meningkatkan kapabilitas industri pertahanan nasionalnya. Cukup banyak kerjasama yang telah berjalan serta penawaran-penawaran yang masih dalam pertimbangan pemerintah Indonesia. Dibandingkan dengan negara maju lainnya, Prancis merupakan negara yang berkontribusi besar dalam membantu Indonesia. Sangat mustahil bagi Indonesia mengharapkan negara seperti Amerika Serikat, Rusia dan China untuk mendukung industri pertahanan nasional dengan memberikan ToK maupun ToT. Kemudian negara seperti Jerman, Belanda, Spanyol hingga Korea Selatan hanya mampu memberikan manfaat pada jenis alutsista tertentu. Prancis dengan industri pertahanan yang mapan dan penguasaan teknologinya memberikan Indonesia kesempatan dalam mengembangkan industri pertahanan dari berbagai aspek, mulai dari pesawat, helikopter, kapal, hingga amunisi. Meskipun jumlah alutsista yang dapat dipenuhi melalui kerjasama industri pertahanan Indonesia-Prancis dalam pembangunan MEF Tahap II belum mencapai target secara keseluruhan, namun penyelenggaraan kerjasama industri pertahanan ini telah banyak memberikan manfaat dalam memenuhi sasaran. Oleh karena itu, kerjasama industri pertahanan Indonesia dengan Prancis dapat dikatakan berpengaruh

---

<sup>27</sup> Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia, 7

dalam proses peremajaan alutsista TNI. Namun, masih perlu dilakukan peningkatan yang besar dalam pengadaan alutsista khususnya pada sektor pertahanan laut dan udara.

Kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Prancis ini sejalan dengan konsep kerjasama pertahanan yang diutarakan oleh Helen Milner dalam tulisannya berjudul *International Theories of Cooperation Among Nations Strengths and Weakness*, di mana dikatakan kerjasama sebagai sesuatu yang pada dasarnya harus mengarah pada 'rewards' untuk semua pihak/semua negara, tidak harus mendapat imbalan yang sama tetapi semua mendapat manfaat dari kerjasama tersebut. Meskipun Prancis tidak mendapat imbalan serupa dalam hal ini mengenai manfaat industri pertahanan, namun melalui kerjasama dengan Indonesia Prancis mengambil manfaat dalam memenuhi kebijakan luar negeri nasionalnya dan prinsipnya dalam menjaga perdamaian dunia. Alasan utama Prancis dalam menjalin kerjasama yang saling mendukung dengan Indonesia didasari kepercayaan bahwa Indonesia memiliki prinsip yang sama untuk menjaga perdamaian dunia, sehingga kemudian Indonesia dianggap sebagai mitra strategis dalam menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik.

## **KESIMPULAN**

Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Prancis sejatinya telah terjalin cukup lama. Hubungan kedua negara tersebut dapat dikatakan hampir tidak pernah mengalami penurunan, melainkan semakin baik dan terus meningkat. Hubungan kedua negara

merupakan hubungan saling mendukung dengan komitmen yang sama yakni menjaga perdamaian dunia. Prancis sangat mendukung dilakukannya pembangunan kapabilitas pertahanan Indonesia melalui *Minimum Essential Force* (MEF). Komitmen Prancis dalam mendukung peningkatan kapabilitas pertahanan Indonesia diwujudkan melalui *Joint Statement on Strategic Partnership* tahun 2011. Setelah kemitraan strategis tersebut, Prancis sangat aktif dalam membantu Indonesia melakukan pembaruan pertahanan salah satunya dengan mendorong kerja sama industri pertahanan. Prancis mendorong industri pertahanan nasionalnya untuk membantu meningkatkan kemampuan industri pertahanan Indonesia dalam memproduksi alutsista.

Kerja sama industri pertahanan Indonesia dengan Prancis dalam memenuhi kebutuhan Indonesia akan alat-alat militer memberikan pengaruh meskipun belum terlalu signifikan. Kerja sama industri pertahanan Indonesia dengan Prancis pada periode ini tidak saja memberikan manfaat fisik dalam hal ini pemenuhan kebutuhan alutsista TNI, melainkan juga memberikan manfaat non-fisik seperti terwujudnya sasaran – sasaran pembangunan MEF tahap II. Selain itu, melalui kerja sama dengan industri pertahanan Prancis, Indonesia mampu mengambil manfaat non-fisik lainnya seperti alih teknologi, di mana hal ini sesuai dengan Undang-Undang dan sasaran dari MEF yaitu terwujudnya industri pertahanan yang maju, mandiri dan berdaya saing. Meskipun begitu, masih diperlukan peningkatan kerja sama pada sektor pertahanan laut dan udara, pada dasarnya Indonesia dan Prancis telah melakukan kerja sama yang dapat

mendukung pertahanan laut dan udara Indonesia, meskipun kerja sama ini masih belum terealisasi, namun akan segera dilakukan pada tahun yang telah ditargetkan. Pada sektor pertahanan udara, Indonesia tampaknya belum dapat meninggalkan jejak historisnya pada produk milik Rusia dan Amerika Serikat, meskipun kedua negara tersebut tidak terbuka dalam alih teknologi. Sedangkan pada pertahanan laut, pemerintah Indonesia masih mempercayakan pada produk-produk milik Belanda yang sejak lama digunakan. Selain itu, kondisi industri pertahanan Indonesia sendiri belum cukup kuat untuk membangun kebutuhan pertahanan laut dan udara.

Yang terkini, pemerintah Indonesia melalui menteri pertahanan Prabowo Subianto, menyatakan akan lebih mempererat kembali kerja sama pertahanan dengan Prancis melalui *Defence Cooperation Agreement* yang telah ditanda tangani pada 28 Juni 2021. DCA yang sempat mandek dalam proses pembuatan draftnya, kini telah berhasil ditanda tangani, diharapkan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Prancis akan semakin erat. Melalui penanda tanganan DCA, dapat diketahui menteri pertahanan Indonesia semakin menyadari pentingnya kerja sama pertahanan dengan Prancis yang terus mendukung kemajuan pertahanan Indonesia, khususnya dalam memperkuat alutsista TNI dan memajukan industri pertahanan.

## REFERENSI

### BUKU

Arief, Subiyanto. *Metode Dan Teknik Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2007.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1990.

Cohen, E. "Change and Transformation in Military Affairs." Dalam *Military Transformation and Strategy: Revolution in Military Affairs and Small States*, oleh Bernard Loo, 16. London: Routledge, 2009.

Mas'oeed, Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES, 1990.

Matthews, R. *Managing the Revolution in Military*. New York: Palgrave, 2001.

Schreer, Benjamin. *Moving Beyond Ambitions? Indonesia's Military Modernisation*. Australia: Australian Strategic Policy Institute, 2013.

Schneider, B. R., & Grinter, L. E. *Battlefield of The Future 21st Century Warfare Issues*. Washington D.C: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, 1998.

Sloan, E. C. *Military Transformation and Modern Warfare*. London: Praeger Security International, 1965.

Suryono, Tri. *Optimalisasi Pemberdayaan Industri Strategis Nasional Guna Mendukung Kesiapan Alutsista TNI dalam Rangka Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2014

U.S. Congress of Technology Assesment. *Lessons in Restructuring Defense Industry: The French Experience*. . Washington DC: June, 1992.

## JURNAL

- Baldwin, David A. "The concept of security." *International Studies* 23, No.1, 1997: 5-26.
- Bitzinger, Richard A. "Come The Revolution, Transforming The Asia-Pacific's Militaries." *Naval War College Review* (Vol. 58 No. 4), 2005: 38.
- Bitzinger, Richard A. "Military-Technological Innovation In Small States: The cases of Israel and Singapore." *Journal of Strategic Studies*, 2021: 1-28.
- Laird, Robbin E., & Mey, HolgerH. *The Revolution in Military Affairs: Allied Perspectives*. US: DIANE Publishing, 1999.
- Muradi. "Praktik-praktik Defense Offset Di Indonesia." *Analisis CSIS* (Vol. 37 No. 3), 2008.
- Steinsson, Sverrir. "John Mearsheimer's theory of offensive realism and the rise of China." *E-International Relations* 6, 2014: 2.
- Suryanti, Budhi T. "Pendekatan Neorealis terhadap Studi Keamanan Nasional." *Jurnal Diplomasi Pertahanan* 7, No. 1, 2021: 31.
- Toft, Peter. "John J. Mearsheimer: An Offensive Realist Between Geopolitics And Power." *Journal of International Relations and Development* 8, No. 4, 2005: 381-408.

#### **DOKUMEN RESMI**

- Delegasi Komisi I DPR RI. *Laporan Studi Banding RUU Tentang KMIP Ke Prancis*. Jakarta: DPR RI, 2007.
- Konstitusi 4 Oktober 1958, Judul II, Pasal 15.

- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 19 Tahun 2012, Lampiran, hal. 4.
- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014. *Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Indonesia Pasal 1*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, Pasal 1 ayat 2.

#### **SITUS RESMI**

- Airbus. *A Journey to Airbus' Roots*. [https://www.airbushelicopters.co.za/website/en/ref/History\\_186.html](https://www.airbushelicopters.co.za/website/en/ref/History_186.html) (diakses pada Mei 21, 2023).
- Business Insider. *The World's Strongest Militaries*. <https://www.businessinsider.in/defense/ranked-the-worlds-20-strongest-militaries/slidelist/51930339.cms#slideid=51930340> (diakses pada Desember 15, 2022).
- Dirgantara Indonesia. *Aircraft AS550*. [https://www.indonesian-aerospace.com/aircraftid/detail/34\\_as550](https://www.indonesian-aerospace.com/aircraftid/detail/34_as550) (diakses pada Mei 21, 2023).
- Gang, Kong. *Arms Export: France's New Glory?* 10 17, 2019. [http://eng.chinamil.com.cn/CHINA\\_209163/TopStories\\_209189/9654796.html](http://eng.chinamil.com.cn/CHINA_209163/TopStories_209189/9654796.html) (diakses pada Desember 15, 2022).
- Global Firepower. *Military Strength Ranking*.

- <https://www.globalfirepower.com/global-ranks-previous.php>. (diakses pada Desember 15, 2022).
- Kedutaan Besar Republik Indonesia. *Hubungan Bilateral Prancis-Indonesia*. (diakses pada desember 15, 2022).
- Kementerian Luar Negeri RI. *Menhan RI dan Menhan Prancis Terus Pererat Kerja Sama Pertahanan*. (diakses pada Desember 15, 2022).
- Kementerian Luar Negeri RI. *Hubungan Bilateral Prancis-Indonesia*. (diakses pada Desember 15, 2022).
- Kementerian Pertahanan RI. *Kunker Menhan RI ke Prancis, Tandai 70 Tahun Hubungan Diplomatik RI – Prancis*. (diakses pada Mei 20, 2023).
- Kementerian Pertahanan RI. *Menhan RI Terima Kunjungan Kehormatan Menhan Perancis*. (diakses pada Desember 20, 2022).
- Kementerian Pertahanan RI. *Menhan RI Terima Kunjungan Kehormatan Menhan Perancis*. (diakses pada Desember 15, 2022).
- Kementerian Pertahanan RI. *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Strategi Pertahanan, 2015.
- Kementerian Pertahanan RI. *Indonesia-France Defence Dialogue (IFDD) ke-9 Tahun 2022*. (diakses pada Desember 15, 2022).
- Kementerian Pertahanan RI. *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, 2015.
- MBDA. *History: Fifty Years of European Technological and Operational Excellence*. <https://www.mbdasystems.com/about-us/history/> (diakses pada Mei 21, 2023).
- MBDA. *Press Releases: MBDA Signs Industrial Accord With PT. PINDAD of Indonesia*. <https://www.mbdasystems.com/press-releases/mbda-signs-industrial-accord-with-pt-pindad-of-indonesia/>. (diakses pada Mei 21, 2023).
- PT Pindad. *Anoa 6X6 APC*. <https://pindad.com/anoa-6-x-6-apc> (diakses pada Desember 15, 2022).
- SIPRI. *Military Expenditure Database*. <https://milex.sipri.org/sipri>. (diakses pada Desember 15, 2022).
- Zahara, Ervita L., & M.N., Arjun Rizky. "Anggaran Pertahanan Indonesia Pemenuhan Minimum Essential Force." 2020. <https://berkas.dpr.go.id/puskajiangaran/analisis-ringkas-cepat/public-file/analisis-ringkas-cepat-public-28.pdf>.